

ABSTRAK

Irma Humairoh: *Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Desa Jatimekar Sesuai Dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Ditinjau Dari Prespektif Siyasa Dusturiyah*

Undang-undang No. 38 tentang Jalan merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam menangani pemeliharaan pembangunan jalan. Dalam undang tersebut telah disebutkan bahwa mengenai pemeliharaan jalan yang diberikan kewajiban untuk pemeliharaan pembangunan sesuai dengan pasal 1 adalah pemerintah pusat yang kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabuapten Sumedang itu sendiri untuk mengurus rumah tangganya. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sehingga pemerintah daerah semakin leluasa dan lebih bertanggung jawab dalam mengurus segala aspek permasalahan yang ada dalam daerahnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan Jalan di desa Jatimekar; Apa yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merealisasikan pemeliharaan jalan di desa Jatimekar; dan Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan jalan di desa Jatimekar.

Penelitian bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pengertian siyasa dusturiyah adalah pengaturan dan pengendalian pemerintah dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan. Dasar hukum dalam pemberdayaan kehidupan bernegara adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma serta ijtihad. Ijma melahirkan peraturan perundang-undangan sebagaimana lahirnya peraturan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan kandungan data. Data primernya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta data yang diperoleh dari dinas PU Kabupaten Sumedang. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang tidak memerlukan suatu perhitungan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, catatan lapangan, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintah dalam merealisasikan pemeliharaan jalan masih belum maksimal. Disebabkan karena terjadinya dana yang sedikit sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan belum maksimal dan mengalami keterlambatan dalam merealisasikannya. Dan pemerintah menghimbau masyarakat setempat khususnya di desa Jatimekar untuk ikut berperan dalam pemeliharaan jalan tersebut. Namun konsep asas yang tercantum dalam UU No. 38 tahun 2004 sesuai dengan Konsep Siyasa Dusturiyah yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.